BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Latar Belakang Penelitian

Saat ini pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam Negeri Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan Negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan sekitar 73,7% dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak (www.fiskaldepkeu.go.id). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. (www.fiskaldepkeu.go.id)

Beberapa tahun belakangan ini Negara kita sedang gencar-gencarnya melakukan suatu trobosan terutama dalam bidang perpajakan yang dirangkum dalam modernisasi perpajakan. Hal ini sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan salah satu misinya adalah menghimpun penerimaan pajak, karena pajak merupakan sumber utama untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara. Dengan pajak suatu Negara dapat melaksanakan pembangunan disegala sektor, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut Negara sangat bergantung kepada dana, baik dana dari dalam maupun luar negeri. Dana dari dalam negeri diperoleh dari pajak, karena pajak merupakan

sumber penerimaan Negara yang paling besar di bandingkan dengan penerimaan Negara selain pajak, sedangkan penerimaan Negara dari luar negeri diperoleh dari pinjaman luar negeri, bantuan atau hibah maupun biaya ekspor impor.

Mochamad Tjiptardjo juga mengungkapkan, bahwa realisasi penerimaan pajak negara dari sektor PPh nonmigas selama 3 tahun terakhir tidak tercapai sesuai dengan RAPBN-P, yaitu untuk tahun 2006 hanya Rp166 triliun sedangkan yang ditetapkan dalam RAPBN-P sebesar Rp175 triliun. Pada tahun 2007 realisasi PPh nonmigas hanya Rp194 triliun padahal target APBN-P ditetapkan sebesar Rp214 triliun. Pada tahun 2008 target APBN-P Rp251 tapi realisasinya Rp 250 triliun. Hal tersebut yang menyebabkan tax ratio Indonesia saat ini masih rendah yaitu antara 12%-13%. (Mochamad Tjiptardjo, 4 Januari 2010).

Dengan adanya fenomena penurunan tingkat penerimaan pajak pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tax ratio Indonesia yang masih rendah, maka ini akan menjadi tugas mulia bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintahan yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan, dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, dengan menetapkan salah satu misinya yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yaitu untuk menunjang kemandirian pembiyaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efesiensi yang tinggi.

(Markus Taufan Sofyan, 2005.)

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2002 juga telah melakukan reforamsi perpajakan, yakni dengan berdirinya Kanwil KPP Wajib Pajak Besar (LTO/Large Taxpayer Office) merupakan model kantor pajak yang ideal, dan keberadaan kantor pajak tersebut dibutuhkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Untuk merespon semangat good governance dimana institusi pemerintah sebagai pelayanan publik dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dengan berbasis kepada transparansi dan akuntabilitas. Hal ini bermaksud untuk memberantas praktek korupsi.
b. Untuk mengimplementasikan knowing yout tax player blue print Dirjen Pajak tahun 2002. Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang dicantumkan dalam cetak biru (Blue Print) tersebut diantaranya terdapat strategi sebagai berikut:
    1. Reformasi moral, etika dan integritas.
    2. Reformasi kebijakan perpajakan.
    3. Reformasi pelayanan terhadap wajib pajak.
    4. Reformasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
c. Untuk menciptakan citra dan kesan yang baik mengenai Dirjen Pajak melalui pemberian pelayanan yang profesional sekaligus mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

d. Untuk mempersiapkan pelayanan kantor pajak otomasi yang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan juga melakukan administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi, di antaranya pelayanan dengan konsep *one stop service*, yaitu pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas *account representative*, dan pemanfaatan IT dalam layanan *e-filling*, adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem on-line dan real time, e-SPT adalah aplikasi *(software)* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT, *e-registration* adalah sistem aplikasi bagi sebagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangakat lunak yang dihubungkan oleh perangakat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak, dan pembentukan call center untuk pelayanan informasi dan pengaduan.

(Amirudin Maruf, 2 Desember 2009).

Pemeriksaan pajak selain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidakadilan dalam perlakuan perpajakan diantara sesama Wajib Pajak. Usaha melambagakan pemeriksaan sebagai salah satu alat pengawasan terhadap Wajib Pajak terus dikembangkan, dengan prinsip bahwa setiap Wajib Pajak tanpa kecuali terbuka kemungkinannya untuk dilakukan pemeriksaan. Meskipun demikian, prioritas

pemeriksaan tetap digunakan dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif kepada Wajib Pajak lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *self assesment system*. Tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum. (Salip dan Tendy:2006)

Pemeriksaan pajak sampai saat ini masih dipandang sebagai sosok yang menakutkan dan terkesan angker bagi Wajib Pajak. Hal ini bisa terjadi karena masih adanya pemeriksa yang berpilaku menakutkan sehingga image pemeriksaan sebagai hantu pemeriksaan sulit untuk dihilangkan. Dalam praktik perpajakan yang sehat seharusnya pemeriksaan tidak lagi dipandang sebagai hal yang menakutkan, hal ini dapat dibangun melalui meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksa pajak melalui pendidikan pemeriksaan pajak, meningkatkan penanaman moral dan etika bagi pemeriksa dan melakukan sosialisasi secara yang diharapkan dapat terjangkau oleh seluruh Wajib Pajak. (Nur Hidayat:2002)

Selain itu, menurut pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen – dokumen kepada

wajib pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan. (Ainun: 2011)

Begitu juga fenomena yang terjadi di KPP Pratama Bandung tegallega, sampai saat ini dalam peroses penyampaian SPT tahunan orang pribadi banyak Wajib Pajak yang sering menunda untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya. Biasanya Wajib Pajak baru memberikan atau menyempaikan SPT jika Wajib Pajak sudah mendapat surat teguran. Hal ini memperlihatkan atau mengindikasikan bahwa kesadara Wajib Pajak masih sangat rendah.

(Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 2011)

Wajib Pajak masih memadang pegawai pajak itu koruptor padahal cuma satu fiskus/pegawai pajak yang melakukan kejahatan ”mafia pajak gayus tambunan” tetapi imbasnya langsung secara nasional yang di rasakan oleh kantor pusat DJP yang langsung turunya jumlah Wajib Pajak di setiap Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia.

(Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 2011)

Wajib Pajak masih mengulur ulur waktu untuk membayar pajak padahal DJP sudah meringankan ketidak sadaran wajib pajak untuk mengajukan surat permohonan perpajangan penyampainan SPT massanya. Hal ini yang meyebabkan seringnya wajib pajak terkena sanksi dengan berupa kenaikan jumlah pajak nya tanpa sepengetahuan wajib pajak

(Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 2011)

Dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh dari adanya strategi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak, dan akan melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS STRATEGI PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK .**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya wajib pajak yang masih belum mau di periksa jumlah pajaknya.
2. Masih belum efektifnya pemeriksaan pajak untuk wajib pajak sehingga wajib pajak masih mengangap remeh masalah perpajakn yang ada di indonesia.
3. Masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh untuk membayar kewajiban perpajakanya.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.

2. Bagaimana Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh Strategi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi peneliti

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Analisis Strategi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak.

2. Bagi instansi

   Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisis Strategi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.

3. Bagi pihak lain

   Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Strategi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai yaitu Analisis Strategi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bndung.

1.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan April sampai Juli 2011.

Tabel 1.1

Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2011	April 2011	Mei 2010	Juni 2011	Juli 2011
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■				
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■				
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi	■				
	4. Menentukan tempat penelitian		■			
II	**Tahap Pelaksanaan:**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi	■				
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan	■				
	3. Penelitian di perusahaan		■			
	4. Penyusunan skripsi			■		
III	**Tahap Pelaporan:**					
	1. Menyiapkan draft skripsi			■		
	2. Sidang akhir skripsi				■	

	3. Penyempurnaan laporan skripsi					
	4. Penggandaan skripsi					